

### BAB III

## KRISIS PANGAN DI BLITAR SELATAN SELAMA DEKADE 1960

### A. Hiperinflasi

Indonesia pada paruh pertama tahun 1960-an memiliki posisi sebagai pemimpin dunia baru, tetapi ekonomi Indonesia merosot dengan cepat. Selama delapan tahun di bawah Demokrasi Terpimpin, rata-rata inflasi melonjak dari dua digit menjadi tiga digit. Inflasi yang terparah yaitu sejak tahun 1963 sebesar 128 %, naik menjadi 594 % pada tahun 1965, dan klimaksnya hingga mencapai 635 % pada tahun 1966.<sup>1</sup> Data ini sempat ditafsirkan secara berlebihan oleh salah satu media cetak AS, *The New York Times* (NYT), dalam bukunya Hermawan Sulistyono. Pertama, media tersebut menyatakan bahwa titik klimaks kenaikan inflasi di Indonesia justru berada pada puncak kekacauan politik nasional (tahun 1965), bukan di tahun 1966. Kedua, NYT melebihkan nilai nominal persentase inflasi, yang seharusnya Hiperinflasi pada tahun 1965 hanya 594 %, namun dalam pemberitaannya diperbesar pada titik 650 % di tahun yang sama.<sup>2</sup> Sebagai media andalan AS, kalau tidak boleh dikatakan alat spionase, pemberitaan NYT tersebut mengesankan adanya tingkat

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 50.

<sup>2</sup> The New York Time (NYT) 18-01-1965, dalam Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 19.

subjektivitas bahkan kelicikan AS untuk mengkacaukan dan memperkeruh kehidupan ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah terpuruk.

Meski demikian, Soekarno tetap bertahan dengan menyatakan kepada wartawan luar negeri, "Inflasi bukanlah suatu hal yang berbahaya, kecuali bila ada kelaparan dan kemiskinan".<sup>3</sup> Soekarno pun pada kesempatan lain juga pernah mengklarifikasi pernyataannya terhadap Duta Besar Amerika mengenai bantuan Amerika ketika wawancara dengan CBS (Media Elektronik AS), beliau mengatakan bahwa pernyataan *go to hell*-nya kepada Dubes Amerika di Jakarta tersebut merupakan bentuk penolakan apabila bantuan itu dimaksudkan untuk mengikat Indonesia. Sebab menurut beliau, Indonesia pernah mendapat pengalaman pahit dengan IMF (*International Monetary Fund*). Sedangkan syarat-syarat dari Uni Soviet dan RRC tidak mengikat sehingga Soekarno mulai berusaha keras untuk meyakinkan Amerika bahwa tindakannya terhadap negara-negara berkembang (seperti Indonesia) tersebut tidaklah *fair*.<sup>4</sup>

Setelah itu, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk hingga memaksa pemerintah mengambil keputusan yang aneh dan tidak populer, yaitu *Sanering*, pemotongan nilai nominal mata uang rupiah dari Rp.1000,- menjadi Rp.1,-. Inflasi yang sangat tinggi tersebut juga menyebabkan sulit mengatur nilai tukar dollar pada periode itu. Sebagaimana dilaporkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta yaitu

---

<sup>3</sup> The New York Time (NYT) 18-01-1965, dalam *ibid.*

<sup>4</sup> *Duta Masyarakat*, Kamis, 20-05-1965.

bahwa “jika berdasarkan nilai rupiah setelah sanering, kurs resmi di Irian Barat adalah AS\$1= Rp.3.- atau Rp.4,-. Tetapi jika kita dasarkan nilai tukar lama (sebelum sanering) kurs yang digunakan adalah Rp.1,- = AS\$4 atau AS\$1= Rp.0,25,-.”<sup>5</sup>

Kebijakan *sanering* di tahun 1966 tersebut dimaksudkan untuk memecahkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Antara 1954 hingga 1959 terjadi defisit anggaran, suplay uang dan biaya hidup meningkat hampir tiga kali lipat.<sup>6</sup>
2. Pada tahun 1962, defisit pemerintah dan suplay uang berlipat empat kali dan biaya hidup menjadi lima kali lipat ketika harga-harga melonjak, dan nilai tukar resmi jauh lebih rendah dibandingkan nilai tukar pasar.<sup>7</sup>
3. Biaya hidup sehari-hari pada tahun 1957 sekitar Rp.100,- setara dengan Rp.348,- menjelang akhir 1960, melonjak menjadi Rp.16.000,- pada akhir 1965, dan Rp.150.000,- pada Juli 1966.<sup>8</sup> Akibat situasi ini, orang lebih suka menyimpan barang (khususnya bahan-bahan kebutuhan pokok) ketimbang uang.

Keadaan tersebut secara terus menerus merupakan satu rangkaian dan tidak dapat dipisahkan dari fenomena kegagalan panen tanaman utama, serta perkembangan penduduk yang pesat. Pada masa itu produksi padi menurun hampir

---

<sup>5</sup> Hermawan Sulisty, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>6</sup> NYT, 18-01-1965, dalam *ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> A.H. Nasution, “Ketetapan-ketetapan MPRS Tonggak Konstitusional Orde Baru”, (Jakarta: CV. Pantjuran Tujuh, 1966)., dalam *ibid.*

14 % dibandingkan produksi tahun 1940. Sementara itu, di antara tahun 1940 dan 1960 penduduk Jawa meningkat kira-kira 40 % yaitu dari 48,4 juta jiwa menjadi 67,1 juta jiwa.<sup>9</sup> Pada ukuran yang sama, kondisi swasembada beras mencapai tingkat terendah. Tahun 1963 produksi pangan hanya mencapai 87,4 %, sedangkan sebelum tahun 1950 mencapai 94,5 % dan bahkan tahun 1955 pernah mencapai  $\pm$  98,3 %.<sup>10</sup> Hal ini semakin diperburuk ketika mulai 1 Oktober 1962 di Jatim harga padi-gabah mulai dinaikkan 30 % dan bagi para petani di Jatim diberi kesempatan membeli pakaian atau tekstil dua meter per kwintal padi yang disetorkan. Hal ini dilakukan agar pemasukan padi dapat menutup jatah minimum untuk Jatim yaitu sebanyak 550.000 ton.<sup>11</sup>

**Tabel 2**  
**Pembelian Padi di Jawa oleh Pemerintah 1952-1962**  
**(dalam Satuan Ton Padi Kering)**

Tahun Panen	Target	Pembelian	Terkumpul (%)
1952-1953	800.000	495.724	62.0
1953-1954	800.000	749.178	93.6
1954-1955	994.000	791.743	79.6
1955-1956	1.200.000	593.484	49.4
1956-1957	800.000	514.006	64.2
1957-1958	800.000	692.683	83.9
1958-1959	900.000	324.687	36.0
1959-1960	900.000	536.583	59.6
1960-1961	1.000.000	544.804	54.4
1961-1962	1.000.000	517.250	51.7
1962-1963	1.400.000	-	-

Sumber: Karl Pelzer dalam Glassburner dalam Fadjar Pratikto (2000: hlm. 3).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan : Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta : Media Pressindo dkk, 2000), hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Harian Djawa Timur*, Jum'at Wage, 05-10-1962.

<sup>12</sup> Keterangan Tabel :

Berdasarkan tabel di atas, cukup meyakinkan bahwa teori Keynes masih relevan untuk memahami gejala terjadinya inflasi di Indonesia, ketika sejak dekade 1950-an permintaan masyarakat akan barang-barang (terutama beras) selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hingga akhirnya impor beras pun terjadi yang mensyaratkan adanya pencetakan jumlah mata uang rupiah semakin tinggi. Selanjutnya muncullah hiperinflasi yang dimulai tahun 1963 hingga klimaksnya di tahun 1966.<sup>13</sup> Sehubungan dengan itu, untuk memperjelas munculnya hiperinflasi di Indonesia, maka sebaiknya perlu membandingkan antara periode selama inflasi tahun 1963-1966 dengan sesudah inflasi mulai dapat dikendalikan tahun 1967-1968.

### **1. Periode 1963 – 1966**

Dalam periode 1963/64 dan 1964/65, jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk yang berpendapatan rendah di Jawa telah menurun dari 22,04 % menjadi 20,05 % atau penurunan sebesar 1,99 %. Penurunan pembagian pendapatan ini terjadi pula pada golongan menengah sebesar 1,27 %. Ini berarti

- 
- a. Maksud dari kolom Target yaitu rencana pembelian atau impor padi untuk memenuhi kebutuhan pangan di Jawa, hal ini dilakukan karena produksi padi dalam negeri tidak terpenuhi lagi.
  - b. Maksud dari kolom Pembelian yaitu kemampuan pemerintah untuk mengimpor padi guna memenuhi kebutuhan pangan di Jawa.
  - c. Maksud dari kolom Terkumpul (%) yaitu persentasi kemampuan impor pemerintah atas target pembelian.

<sup>13</sup> Lihat teori Keynes tentang Inflasi di bab satu, hlm. 15-17 dalam riset ini.

hanya golongan berpendapatan tinggi yang memperoleh pertambahan sebesar 3,26 %.<sup>14</sup>

**Tabel 3**  
**Perkembangan Pembagian Pendapatan per-kapita menurut Kelompok Penduduk di Jawa secara keseluruhan 1963/64-1967**

Wilayah	Tahun	Pengeluaran rata-rata (Rp)	40 % Terendah	40 % Menengah	20 % Tertinggi
Jawa-Madura	1963/64	2.831	22,04	40,15	37,81
	1964/65	4.832	20,05	38,88	41,07
	1966	-	-	-	-
	1967	465	23,29	38,37	38,34

Sumber: Hendra Esmana (1976: halaman 134).

Dalam periode 1963/64 dan 1964/65, penduduk daerah kota yang memperoleh pertambahan pendapatan tersebut terdapat pada golongan berpendapatan tinggi sebesar 6,94 %, sedangkan pada daerah pedesaan mencapai 2,75 %. Baik di daerah kota maupun pedesaan, golongan yang berpendapatan rendah dan menengah telah memperoleh pembagian pendapatan yang lebih kecil antara tahun 1963/64 dan 1964/65 tersebut.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan itu, pada tahun 1962 ada sebuah kritikan tajam dari Front Nasional dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Pertama Urusan Distribusi yaitu supaya pemerintah pada tahun 1963 tidak lagi menaikkan harga-harga dan tarif-tarif, mulai melancarkan distribusi beras dan bahan-bahan

<sup>14</sup> Hendra Esmana, *Proyek Penelitian Perspektif Jangka Panjang Perekonomian Indonesia: Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia 1925-1973/74 (Sebuah Laporan kepada Lekmas-LIPI)*, (Padang: Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 1976), hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

kebutuhan pokok lainnya, dilakukannya musyawarah dengan DPRGR di setiap pemerintahan daerah yang bermaksud untuk merubah harga dan tarif, serta menjadi penyalur daripada hasrat rakyat yang semakin keras menuntut perbaikan ekonomi dalam negeri. Sedangkan mengenai inflasi, Front Nasional memberi kesan bahwa masyarakat Indonesia harus terus melaksanakan dan mengembangkan pembangunan. Untuk itu, inflasi harus distop dan produksi segera dinaikkan sehingga ada kesejajaran dalam pengeluaran keuangan dengan keadaan beras. Menanggapi surat tersebut, menteri menyatakan bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut, tidak cukup pemerintah sendiri yang harus bertindak, tetapi kerjasama seluruh rakyat menanggulangi kesulitan harus dan telah dilakukan. Adapun usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mendorong kesadaran rakyat untuk menciptakan produksi dan melancarkan distribusi yaitu diantaranya dengan cara mengadakan musyawarah kerja yang menyangkut berbagai bidang seperti musyawarah transport, musyawarah tani, musyawarah wanita, dll.<sup>16</sup>

Lain halnya dengan pemberitaan Duta Masyarakat, dalam *Headline*-nya dinyatakan bahwa "Rakyat menghadapi teror harga yang mengancam seluruh kehidupan ekonomi", begitulah inti dari pernyataan DN. Aidit (selaku Wakil Ketua MPRS) dalam ceramahnya di hadapan pejabat-pejabat Departemen Perburuhan. Sehubungan dengan pernyataannya di atas, beliau lebih banyak

---

<sup>16</sup> *Trompet Masyarakat*, Jur'at, 02-05-1962.

menyoroti penerapan peraturan Dekon (Deklarasi Ekonomi) yang dianggapnya telah menimbulkan banyak protes dan celaan cukup luas. Bagaimana tidak, kenaikan harga-harga dan tarif, devaluasi, pengendalian harga dilepaskan, perusahaan dagang negara segera diliberalisasi dengan jalan pemberian fasilitas-fasilitas dan perlakuan-perlakuan istimewa dilakukan atas nama Dekon. Padahal, sebelum jauh-jauh Dekon dideklarasikan oleh Soekarno (28 Maret 1963) Kaum Buruh sudah membahas kesulitan-kesulitan ekonomi. Kaum Buruh adalah kunci kesulitan ekonomi sehingga kaum buruh harus ikut serta aktif dalam penyusunan proses produksi.<sup>17</sup> Solusi yang disampaikan Aidit tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Marxisme terutama mengenai teori kesengsaraan, yang senantiasa mengangkat martabat kaum buruh.<sup>18</sup>

Sedangkan tentang kenaikan harga, Aidit menangkap situasi tersebut hampir sama dengan situasi perekonomian masa Soemitro dalam usaha untuk membanjiri pasaran. Sebab menurut Aidit, penghapusan pengendalian harga barang tersebut dapat mengarah kepada bencana besar bagi rakyat pekerja dalam bentuk kenaikan harga. Di satu pihak teror dilancarkan oleh kontra-revolusi dalam bentuk teror rasial yang sangat merusak aparat ekonomi dan penghidupan rakyat, di pihak lain rakyat menghadapi teror harga yang mengancam tugas kehidupan ekonomi. Jadi dua teror inilah yang seharusnya dihapuskan demi DEKON,

---

<sup>17</sup> *Duta Masyarakat*, Jum'at, 21-06-1963.

<sup>18</sup> Lihat Implementasi teori Marx di bab satu, hlm. 18 dalam riset ini.



menurut penegasan beliau. Karena kalau tidak demikian, maka DEKON akan bertentangan dengan resolusi MPRS yang menyatakan bahwa politik harga harus ditujukan untuk mencegah kenaikan tarif dan hanya menuju terlaksananya ketetapan MPRS II/1960 (yaitu kenaikan harga harus disesuaikan dengan perkembangan produksi dan mampu meningkatkan daya beli rakyat pekerja, terutama petani).<sup>19</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa negara sedang menghadapi masalah pangan yang sangat kritis di awal pembangunannya. Memburuknya produksi beras tersebut melatarbelakangi keputusan pemerintah untuk membuat program jangka pendek dalam meningkatkan hasil bahan pangan yakni melalui “Rencana Tiga Tahun Produksi Beras” yang dimulai pada tahun 1959. Fungsi dari program ini selain mengatasi masalah kelangkaan pangan yang terjadi di beberapa daerah, juga berguna meningkatkan produksi pangan sehingga pada akhir tahun 1962 diharapkan sudah mencapai *self-surpporting* beras. Adapun rencana itu didasarkan pada pengembangan pertanian melalui beberapa cara intensifikasi pertanian, yaitu: pemakaian bibit padi jenis unggul, penggunaan pupuk buatan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pemberian atau peminjaman modal kepada petani, dan perbaikan pertanian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Duta Masyarakat*, Jum'at, 21-06-1963.

<sup>20</sup> “*Madjalah Dirgahayu*, No. 12”, dalam Fadjat Pratikto, *op. cit.*, hlm. 43.

Namun, ketika kita memperhatikan keberadaan golongan orang-orang yang keadaan pangannya memprihatinkan ini, terutama pada musim kemarau dan paceklik yang panjang, waktu itu tidak mampu mendorong pemerintah mengambil tindakan-tindakan seperti pemberian bantuan pangan, kecuali hanya intensifikasi pertanian di atas. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan perekonomian negara sendiri waktu itu sangat kacau dan dalam kondisi yang transisi sehingga wajar jika bantuan pemerintah yang diberikan lebih bersifat *low price* (rendah biaya) dan juga bersifat jangka pendek yang semuanya diharapkan dapat memulihkan keadaan sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang tidak ditentukan.

Dampak lebih jauh dari sistem pasar yang pada akhir tahun 1950-an yaitu memburuknya perekonomian nasional serta situasi politik yang tidak stabil, adalah terjadinya inflasi ekonomi sampai ke daerah pedesaan. Inflasi itu menunjukkan kenaikan harga barang yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga secara umum melanda segala jenis barang, mulai dari bahan pangan, pakaian, sampai bahan-bahan pertanian. Inflasi membuat para pedagang dan petani kaya menjadi lebih kaya dan makmur, sedangkan para buruh upahan, penyakap, dan sebagian besar pegawai negeri – khususnya para guru – menjadi amat terpuak, karena adanya jurang antara kenaikan harga pangan dengan tingkat upah atau gaji.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fajar Pratiko, *ibid.*, hlm. 62.

Dengan demikian, tingkat penghidupan ekonomi mayoritas penduduk desa menjadi lebih buruk dan miskin. Hampir sebagian besar dari mereka tidak cukup mampu membeli bahan pangan, khususnya beras dan jagung. Pada saat-saat tertentu mereka bahkan tidak sanggup mengkonsumsi bahan pangan pengganti yang kualitas dan nilai gizinya lebih rendah, seperti gapek, bulgur, dan lain-lain. Kaum-kaum inilah yang menurut Keynes sebagai kaum yang “kalah”, karena penghasilannya tidak naik secepat laju inflasi waktu itu.<sup>22</sup>

Namun, ketidakmampuan ini bukan berarti masyarakat pedesaan, khususnya Blitar Selatan, menjadi sangat menderita menyerupai kasus kelaparan di Gunung Kidul di tahun yang sama sebab sebagaimana masyarakat agraris pada umumnya, terutama yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional, sebagian besar dari kehidupannya sangat tergantung dengan alam.<sup>23</sup> Di Blitar Selatan waktu itu, beras dan jagung justru bukan menjadi makanan utama, melainkan singkonglah atau gapeklah yang menjadi makanan utama sehari-hari sekaligus menjadi makanan tradisional masyarakatnya. Oleh sebab itu, sebesar apapun tekanan inflasi yang dialami negara ini, khususnya di tahun 1963, 64, 65, hingga 1966, masyarakat agraris Blitar Selatan masih dapat bertahan hidup. Adanya kasus kelaparan massal di tahun 1963-1964, untuk daerah di luar Blitar Selatan

---

<sup>22</sup> Lihat bab satu, hlm. 16-17 dalam riset ini.

<sup>23</sup> Dengan demikian, Blitar Selatan merupakan *antithese* dari kesimpulan Fadjar Pratiko yang menyatakan bahwa: “... Ketidakmampuan masyarakat Gunung Kidul untuk membeli bahan pangan yang harganya semakin membumbung tinggi akibat inflasi itulah, yang menyebabkan terjadinya kelaparan massal dan mewabahnya penyakit HO pada tahun 1964.”, dalam Fadjar Pratiko, *op. cit.*, hlm. 62.

yang masyarakatnya sudah tidak begitu terikat dengan alam, mungkin sangat merasakan dampak inflasi tersebut. Tetapi, tidaklah demikian untuk kasus di Blitar Selatan yang sangat terikat dengan alam, selama tanahnya masih terus menerus dapat menghasilkan singkong atau gaplek, maka selama itu pula masyarakat masih tetap dapat hidup normal. Di sini ekonomi *subsistensi* berlaku, hasil alam yang tidak dikomersialkan (tanpa mencari untung-rugi) berlaku, sehingga pemikiran masyarakat setempat waktu itu hanya bagaimana alam dapat memenuhi kebutuhan perutnya sehari-hari, kurang lebih hanya itu.

Tetapi akan lain ceritanya jika alam sudah tidak mau bersahabat dengan manusia, yang diejawantahkan dalam bentuk kemarau panjang, hujan salah musim, dan juga hama tikus yang menghabiskan tanaman penduduk. Dalam kondisi perekonomian negara yang serba sulit dan serba krisis ini, ditambah dengan situasi alam yang tidak menguntungkan, maka yang biasanya masyarakat Blitar Selatan mampu untuk *survive*, berubah menjadi sangat terpuruk atau minus kuadrat.

## **2. Periode 1967 – 1968**

Dalam periode ini, golongan penduduk yang berpendapatan rendah dan menengah di seluruh Jawa telah mengalami kerugian pula dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Penurunan pembagian pendapatan pada kedua golongan tersebut sebesar 4,93 %, seluruhnya diperoleh oleh golongan yang berpendapatan tinggi. Dalam hal ini golongan berpendapatan rendah telah

menyerahkan 60 % dari pertambahan pendapatan golongan berpendapatan tinggi sedangkan selebihnya diberikan oleh golongan menengah. Pada periode ini pula pendapatan penduduk yang berpendapatan tinggi di daerah pedesaan bertambah sebesar 2,75 %.<sup>24</sup>

Perkiraan laju pertumbuhan pendapatan dengan memperhatikan tingkat pendapatan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses perubahan pola pembagian pendapatan tersebut. Tabel 3 memperlihatkan perkiraan pertumbuhan pendapatan riil dalam periode 1967-1969 baik untuk golongan penduduk yang berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi di daerah pedesaan di Jawa. Indeks Biaya Hidup (Jakarta, September 1966 = 100) telah dipergunakan selaku deflator.<sup>25</sup>

**Tabel 4**  
**Laju Pertumbuhan Pendapatan di Jawa 1967-1969**

Tingkat Pendapatan / wilayah	1967	1969	Laju Pertumbuhan Tahunan (%)
Rendah	3.491,29	3.433,61	- 0,83
Menengah	5.751,85	6.125,09	+ 3,19
Tinggi	5.747,36	7.231,57	+ 12,17
Jawa	14.990,50	16.790,27	+ 5,83
Kota	3.449,13	4.082,63	+ 8,80
Pedesaan	11.541,37	12.707,64	+ 4,93

Sumber: Hendra Esmana (1976: hlm. 135)

Selama periode 1967-1969 pendapatan riil golongan penduduk yang berpendapatan rendah tetap berkurang rata-rata setiap tahunnya 0,83 %,

<sup>24</sup> Hendra Esmana, *op. cit.*, hlm. 134-135.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

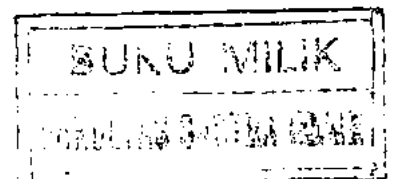
sedangkan golongan menengah meningkat sebesar 3,19 %. Sebaliknya golongan yang berpendapatan tinggi telah meningkat sebesar 12,17 %.<sup>26</sup> Dan sejak awal 1960-an hingga 1966, peningkatan pendapatan bagi golongan berpenghasilan tinggi tumbuh sangat tidak wajar. Hal ini dapat kita bandingkan juga dengan laju harga barang-barang yang kelihatannya selalu menaik. Kenaikan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya persediaan satu barang tertentu, melainkan juga barang yang kelihatannya banyak tetapi pada saat tertentu tetap juga naik. Ini seolah-olah ada golongan tertentu yang mengatur dan menetapkan kenaikan tersebut, tentunya dengan maksud mengeruk kekayaan semaksimal mungkin sehingga hal ini sangat menggelisahkan rakyat (baik golongan berpenghasilan rendah maupun menengah).<sup>27</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Keynes dalam teori Inflasi dan teori permintaan uang-nya, yakni bahwa perilaku serakah dari beberapa golongan masyarakat dengan motif-motif spekulatif itulah yang besar kemungkinan meningkatkan nilai inflasi Indonesia hingga mencapai titik "hiper".<sup>28</sup> Motif-motif spekulatif ini dalam istilah fikih (hukum Islam) disebut *Bai' Najasy* atau Rekayasa Pasar dalam *Demand*, yang artinya bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, yakni seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Caranya bisa

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Duta Masyarakat*, Selasa, 13-09-1966.



macam-macam, mulai dari menyebar isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan (istilah lainnya adalah penimbunan) agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli barang atau saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Praktek rekayasa pasar tersebut jelas hanya bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi, baik itu pihak swasta/pengusaha maupun pihak pemerintah. Kecuali pemerintah, contohnya BULOG, praktek rekayasa pasar tersebut besar kemungkinan berpengaruh dalam kenaikan nilai inflasi di Indonesia awal tahun 1960-an hingga pada titik psikologis (hiper inflasi) dan juga sangat bertentangan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam (*syariah*) yakni “jangan menzalimi dan jangan dizalimi” (*La Tazhlimuna wa la tuzhlamun*).<sup>29</sup>

Hal senada juga dicitrakan oleh ketua MPRS, merangkap Wakil Perdana Menteri III, merangkap Menko Pembangunan, Dr. Choirul Saleh, pada tahun 1965. Berdasarkan pemberitaan Antara di Jakarta 16 Agustus 1965, beliau menegaskan bahwa salah satu faktor penting yang menjadi sebab kenaikan harga ialah masih adanya *organized* dan *unorganized money market* di negara Indonesia waktu itu, dan sebagian besar dari modal swasta masih beroperasi dalam bidang

---

<sup>28</sup> Muchdarsyah Sinungan, *op. cit.*, hlm. 32 dan 59.

<sup>29</sup> Tim Second FSI SM-FEUI dalam Pelatihan Ekonomi Islam, “Identifikasi Transaksi yang Dilarang”, dalam *Workshop on Islamic Banking*, (Depok: FSI SM-FEUI, 20-21 Februari 2003), hlm. 4.

usaha-usaha spekulatif semata. Padahal dalam kenyataannya *organized money market* yang menggerakkan perputaran uang melalui bank-bank pemerintah dan swasta belum sanggup menampung segala aktivitas di bidang ekonomi atau perdagangan di negara kita. Choirul Saleh mengatakan bahwa meskipun bank-bank swasta waktu itu sudah merupakan lembaga yang legal dalam pasar modal di negara kita, tetapi tidak dapat diingkari adanya kenyataan bahwa bank-bank itu oleh *unorganized money market* dijadikan alat penyaluran modal-modal tersebut. Hal inilah yang menurut beliau merupakan sebab utama naiknya harga-harga. Oleh sebab itu, berdasarkan analisisnya maka muncullah beberapa solusi diantaranya yaitu pemerintah harus berusaha menertibkan bank-bank swasta sedemikian rupa hingga dapat mencukupi kebutuhan pembangunan yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Dengan demikian, diharapkan arus barang akan mulai mengimbangi tekanan inflasi dan akan tercipta kondisi-kondisi untuk mendapatkan pasaran dalam negeri yang kuat, yang dapat mengurangi tekanan pengusaha-pengusaha luar negeri di bidang perekonomian dan menurunkan harga dalam negeri.<sup>30</sup>

Hingga pada tahun 1968, konsentrasi pemerintah masih mengenai kebijakan di bidang pangan, yaitu menjadikan masalah beras menjadi masalah pangan (beras, bulgur, terigu, ubi-ubian). Khususnya di Jatim, rakyat umumnya belum mempunyai pengertian untuk menyesuaikan perutnya dengan kemampuan

---

<sup>30</sup> *Berita Antara*, No.10, 16-08-1965.B.



pemerintah hingga muncul pernyataan "Bulgur No, Beras Yes!". Namun ketua BULOG (Mayjen Achmad) menanggapi bahwa pemerintah tidak mampu menutup *gap* 1,7 juta ton beras, yakni apabila semua rakyat menggantungkan diri kepada beras pemerintah.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan itu, Presiden Soeharto sendiri secara serius memimpin rapat tentang peningkatan pangan yang dihadiri oleh Panglima dan Gubernur se-Jawa. Dalam rapat tersebut, Soeharto menekankan penggunaan pupuk CIBA dalam meningkatkan produksi pangan, dengan prediksi hasil produksi per hektar yaitu 2½ ton beras. Direncanakan pula bahwa 300 ribu hektar sawah di Jawa yaitu masing-masing Jabar, Jateng, dan Jatim dalam 100 ribu hektar akan mendapat pupuk-pupuk urea atau TSP dan obat-obatan hama dari CIBA serta akan menyediakan alat-alat pertanian sekaligus kendaraannya seperti Jeep untuk para petani. Menurut Prof. Widjojo, biaya setiap hektarnya dapat mencapai AS\$40 dan diperkirakan menghasilkan 2½ ton.<sup>32</sup> Dengan demikian setelah mengamati solusi yang dikeluarkan pemerintah waktu itu, maka kemungkinan besar kebutuhan pangan masyarakat dan fenomena larang pangan dapat dikatakan selesai.

---

<sup>31</sup> *Duta Masyarakat*, Selasa, 02-07-1963.

<sup>32</sup> *Duta Masyarakat*, 12 Juli 1968

## B. Zaman Merajalelanya Tikus

Meskipun keadaan atau situasi nasional tampak berantakan, namun di Blitar Selatan khususnya pada tahun 1965 tampak aman. Hal ini disebabkan selain Blitar Selatan dari dahulu sudah merupakan basisnya PKI. Disinyalir pula, Blitar Selatan waktu itu dikenal memiliki banyak orang sakti.<sup>33</sup> Keadaan tersebut sebenarnya baru saja dirasakan. Tepatnya antara tahun 1963/64, masyarakat Blitar Selatan terancam penyakit HO (*Honger Oedeem*) yaitu penyakit yang membuat semua tubuh bengkak (*abo*) atau dikenal warga dengan istilah beri-beri basa<sup>34</sup>.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, faktor alam sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Blitar selatan. Keadaan tanah

---

<sup>33</sup> Sebagai daerah yang pernah dikeramatkan dalam historiografi kuno, Blitar Selatan hingga dekade 1960-an masyarakatnya masih mengutamakan sesajen dan masyarakatnya masih banyak yang mengolah kesaktian, yakni dengan cara menguasai tiga jimat dalam bentuk senjata (*gaman*) antara lain Pentong (dikalungkan di leher), Kendit (ikat pinggang), dan Iket (ikat kepala). Jika disingkat menjadi PKI. Wawancara dengan Tekat (77), seorang mantan Danramil Kec. Kademangan Blitar Selatan, pada hari Minggu tanggal 10-1-2003 pukul 13.00-15.00 WIB, di rumah Informan.

<sup>34</sup> Kendati masyarakat waktu itu memandang sama antara penyakit HO dengan Beri-beri, tetapi berbedanya tipis. Kedua-duanya bisa disebabkan oleh kekurangan pangan dan keduanya bisa mematikan meskipun juga keduanya tidak menular. Namun khusus beri-beri juga bisa menyerang komunitas yang cukup pangan tetapi tidak memperhatikan kandungan vitamin B1 (*tiamin*) dalam makanan tersebut. Beri-beri adalah penyakit yang pernah memakan korban beberapa juta jiwa di Timur Jauh dan masih tetap ada di daerah yang sebagian besar penduduknya masih makan beras yang disosoh putih-putih, termasuk Indonesia. Butir beras yang sebagian terbesar vitaminnya berada pada lapisan luar dan dinding benih, karena mudah rusak, maka biasanya beras digiling dan disosoh putih-putih supaya menjadi awet. Cara ini akan menghilangkan tiamin, akibatnya muncullah penyakit beri-beri tersebut. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya padi (yang masih terbungkus kulit) direbus setengah masak sehingga masih banyak tiamin yang dapat "direkatkan" pada butir berasnya. Penyakit ini dapat mengakibatkan kelumpuhan atau payah jantung. Di negara-negara Asia korban penyakit ini kadangkadangkang tampak merangkak-rangkak sambil menyeret kakinya yang lumpuh. Sehubungan dengan kasus Blitar Selatan, jangankan masyarakat yang kecukupan pangan, apalagi masyarakat yang daerahnya sama sekali tidak ada makanan yang layak dimakan, meskipun makanan utamanya bukan beras, pasti ia berpotensi untuk juga kekurangan vitamin B1 yang akhirnya terjangkitlah penyakit beri-beri. Sehingga bisa dikatakan bahwa HO dan beri-beri datangnya berdampingan, HO lebih banyak menyerang anak-anak dan beri-beri lebih banyak menyerang orang dewasa dan orang tua, namun

di sana yang tandus serta terbatasnya lahan pertanian rakyat yang memadai, belum lagi kalau lahan tersebut diserang oleh tikus hingga habis, telah membuat petani hidup dalam ketidakpastian, apalagi bila musibah tersebut bertepatan dengan musim kemarau panjang. Jadi kemiskinan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya bahan pangan adalah fenomena umum dalam kehidupan ekonomi petani pada tahun 1960-an.<sup>35</sup>

Sebenarnya kondisi Blitar Selatan bila dikatakan terjadi kemiskinan yang luar biasa kurang tepat, kemiskinan yang luar biasa di Blitar itu terjadi pada zaman Jepang, sebab yang namanya celana pendek saja berasal dari karung goni. Sedangkan untuk kasus krisis pangan (khususnya beras) di awal tahun 1960-an memang terjadi, namun lebih disebabkan oleh fenomena alam. Meski tidak lebih menderita dibandingkan zaman Jepang, namun fenomena alam tersebut sempat membuat masyarakat Blitar Selatan terpuruk. Bagaimana tidak, rakyat Indonesia waktu itu (terutama daerah pedesaan) masih sangat tergantung kepada alam, makanannya yaitu seperti singkong, gapek, dan jagung. Bulgur masih belum terbiasa, beras pun demikian meski waktu itu pemerintah sudah mulai mengimpor dari luar negeri. Jadi orang desa waktu itu kalau panen padi tiba selalu dijualnya, atau supaya persediaan pangan lebih banyak dan lebih lama maka selanjutnya padi tersebut ditukarkan

---

kedua penyakit tersebut bisa menyerang semua kalangan. Lihat William H. Sebrall Jr, dkk, "Makanan dan Gizi", ed-2, dalam Majalah *Time Life*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1986), hlm.82-83.

<sup>35</sup> Mengenai beberapa banyaknya bahan pangan yang dibutuhkan untuk membuat seseorang hidup layak, lihat D. H. Penny, *Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 45-46., dalam Fadjar Pratikto, *op. cit.*, hlm.68. Menurut Penny dan Singarimbun (1973), rata-rata keluarga

jagung atau gaplek, itulah pengalaman Indonesia waktu itu. Beras atau nasi putih itu sebetulnya adalah kebiasaan makan orang kota, terutama pegawai pemerintah, yang tidak dapat disamakan dengan orang desa.<sup>36</sup>

Sejak tahun 1959, krisis ekonomi sudah mulai terasa hingga di pelosok desa-desa. Setelah itu di tahun 1962 sampai 1964 sebagai daerah pegunungan, Blitar selatan sangat menderita dengan datangnya serangan tikus yang merusak apa saja termasuk persediaan pangan penduduk di tegal-tegal (ladang-ladang). Meskipun Blitar selatan tidak begitu merasakan terjadinya inflasi, namun gejala kelaparan sudah mulai terasa ketika ada serangan tikus, hingga akhirnya paceklik pun melanda sepanjang tahun 1963.<sup>37</sup>

Terlepas dari ajaran Bung Karno yang terkenal dengan “berdiri pada kaki sendiri”. Tahun 1963 situasi sosial masyarakat Blitar Selatan cukup memprihatinkan, mau berdikari ekonomi bagaimana *lha wong* yang dimakan saja tidak ada, ditambah lagi dengan munculnya penyakit HO. Diperkirakan pada waktu itu sebanyak 60 %

---

di Pedesaan Jawa akan memiliki cukup apabila pendapatan total keluarga sebesar 1.200 kg beras per tahun atau 240 kg beras per kepala per tahun, atau  $\pm$  20 kg per kepala per bulan.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pudji Rahardjo (70), seorang mantan aktifis Serikat Buruh (SOBSI) Surabaya, pada hari Minggu, tanggal 20-10-2002, pukul 11.00-13.00 WIB, di rumah Informan. Beliau memang belum pernah berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas PKI Blitar Selatan, namun sebagai aktivis SOBSI (salah satu organisasi yang berada dibawah naungan PKI), beliau tidak pernah *telaat* mengikuti perkembangan Blitar Selatan dari Surabaya.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Suyitno (53), mantan anggota Hansip di tahun 1965 hingga operasi Trisula, sekarang beliau menjadi Kepala Desa Plandirejo Kecamatan Bakung, pada hari Kamis, tanggal 13-02-2003, pukul 18.30-20.30, di rumah Informan.; Dan juga wawancara dengan Chemen (73) warga biasa yang berprofesi sebagai petani di Desa Bakung Kecamatan Bakung, pada hari Sabtu, tanggal 01-02-2003, pukul 19.00 – 20.30 WIB, di rumah informan.

daerah Bakung terserang HO, termasuk daerah Wonotirto. Adapun penyebab utamanya antara lain<sup>38</sup>:

1. Kemarau yang sangat panjang pada tahun 1962
2. Dilanjutkan dengan datangnya musibah hama tikus yang luar biasa, yang meludeskan semua tanaman masyarakat, bahkan berani melukai sebagian ternak (seperti ayam, kambing, dan lembu yang banyak mengalami pendarahan dikupingnya) serta berani mengerat kaki orang yang sedang tidur.

Tikus itu datang secara tiba-tiba dalam bentuk dan jumlah yang besar, bergelombang dari barat ke timur. Adapun jenis tikus, yang biasa disebut warga dengan nama tikus Werog, mempunyai ciri-ciri berdada putih dan besarnya seperti tikus-tikus got di Surabaya sekarang.<sup>39</sup> Besarnya peristiwa tersebut hingga meninggalkan jejak sebuah *luweng* (goa), yang dikenal dengan luweng tikus. Disebut demikian karena waktu itu ada seseorang yang melihat sekawanan tikus masuk ke dalam tanah yang di atasnya terdapat batu besar. Dan setelah batu itu dicukil, maka ada lubang cukup dalam (seperti sumur) yang tiba-tiba mengeluarkan gas hingga seseorang yang hendak berburu tikus tadi terpental beberapa meter.<sup>40</sup>

Akhirnya pada selang tahun tersebut (1962/64) dikenal masyarakat sebagai masa "larang pangan", artinya yang dimakan masyarakat Blitar Selatan seadanya atau

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Mulyono (70), mantan aktivis PGRI dan mantan guru SDN Lorejo Kecamatan Bakung, pada hari selasa, tanggal 04-02-2003, pukul 17.30-18.00, di rumah informan.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Mukadji (64), mantan aktivis Pemuda Rakyat (PR) Blitar Selatan tahun 1960-an, pada tanggal 08-02-2003, pukul 15.45-17.30 WIB, di rumah informan.

<sup>40</sup> Chemen, wawancara.

makan apa saja yang sekiranya dapat dimakan, contohnya makan *ablug* (adalah makanan babi), bonggol<sup>41</sup> *gedang* (bonggol pisang), bonggol *kates* (bonggol pepaya), *Ares*<sup>42</sup>, *degan* (kelapa yang masih muda), pondoh<sup>43</sup> kelapa, *tiwul* (yang berasal dari *suket tegalan* atau rumput sawah, bukannya dari gaplek atau singkong). Dan semua itu setiap hari masih tetap ada, sedangkan singkong maupun jagung pada tahun 1962/63 sulit ditemukan.<sup>44</sup>

### 1. Larang Pangan di Blitar Selatan

Beberapa tahun yang lalu (dari tahun 1966) Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian PBB (*Food and Agricultural Organization, FAO*) mengumumkan bahwa daerah di dunia yang sangat menderita kekurangan makanan waktu itu ialah Timur Jauh (termasuk Indonesia). Jumlah bahan makanan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk masih tetap pada tingkat seperti tahun 1939, meskipun dalam perkembangannya keadaan ini sedikit lebih baik dari

---

<sup>41</sup> Bonggol letaknya di dalam tanah sebagai tempat tumbuhnya akar dan pangkalnya tanaman. Bonggol rasanya *anyep* (tidak berasa seperti air putih), lunak seperti bengkong, mengandung banyak air, dan kalau diperas keluar airnya. Biasanya bonggol yang dikenal masyarakat hanya terdapat pada tanaman pisang.

<sup>42</sup> Ares adalah bagian dari pohon pisang atau *debog* yang berada di tengah-tengahnya, yang nantinya mampu menghasilkan bunga atau *ontong* dan akhirnya berkembang menjadi buah.

<sup>43</sup> Pondoh adalah sumber makanan bagi tanaman yang terletak di atas (pucuk) pohon, yang berfungsi untuk membuat buah, daun, dll seperti pada pohon kelapa.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Suyitno (Desa Plandirejo); Dan Tukidjan (67) yang berprofesi sebagai Petani di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung, pada hari Rabu, tanggal 05-02-2003, pukul 11.00 – 12.00 WIB, di rumah informan.

Afrika dan Amerika Latin. Daerah-daerah yang cukup bahan pangannya ialah Eropa, Amerika Utara, dan beberapa daerah di Pasifik. Umumnya tiap-tiap orang memperoleh kira-kira 3.100 kalori tiap harinya. Ini adalah kira-kira 20 persen lebih banyak dari jumlah kalori yang diperlukan, yaitu kurang lebih 2.400 kalori per harinya.<sup>45</sup>

Namun standar kemiskinan itu sendiri juga berubah-ubah dari satu periode ke periode lainnya. Berdasarkan patokan FAO dan WHO (*World Health Organization*) awal tahun 1960-an, Sajogyo memperkirakan kebutuhan minimum gizi Indonesia sebesar 1.900 kalori dan 40 gram protein per kapita per hari.<sup>46</sup> Dalam periode yang sama, telah terjadi keadaan yang tidak seimbang. Dari segi kalori terdapat kenaikan jumlah penduduk di bawah garis kemelaratan dari 69 % menjadi 75 %. Sebaliknya, dari segi protein terdapat pengurangan jumlah penduduk yang kekurangan protein dari 75 % menjadi 66 %. Perbedaan ini telah terjadi karena dari segi kalori penduduk pedesaan Jawa-Madura mengalami kemunduran tingkat kalori dari 1.742 menjadi 1.539 kalori per kapita per hari.<sup>47</sup> Sebaliknya di tahun 1964/65 tingkat protein meningkat dari 37,1 gram menjadi 42,8 gram.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Arifin Bey dalam *Bahagia*, no. 13, 1966.

<sup>46</sup> FAO/WHO, "Energy and Protein Requirements", (Rome, tanpa penerbit, 1973), pp. 73., dalam Hendra Esmana, *op. cit.*, hlm. 193.

<sup>47</sup> Hendra Esmana, *ibid.*.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

Sehubungan dengan itu, di daerah Blitar Selatan yang minus dan mayoritas kondisi alamnya terdiri dari perbukitan kapur ini penduduknya masih tetap menjadikan gaplek sebagai makanan nomor satunya sekaligus sebagai makanan tradisional yang dikonsumsi secara turun temurun. Padahal berdasarkan pengamatan William H. Sebrell Jr. dalam majalah *Time Life* edisi kedua diperlihatkan bahwa singkong atau gaplek memiliki kandungan sekitar satu gram protein per 100 kalornya, padahal kebutuhan protein orang dewasa per 100 kalornya diperkirakan adalah  $\pm 2,5$  gram protein dan bayi lebih banyak lagi yaitu hampir mencapai lima gram protein per harinya. Dengan demikian, kebiasaan mengkonsumsi penduduk Blitar Selatan bila tidak diimbangi dengan makanan kaya protein lainnya selain gaplek (baik yang bersumber dari nabati maupun hewani), maka masyarakat potensial sekali terserang penyakit busung lupur atau HO.<sup>49</sup>

Ketika Blitar selatan terserang hama tikus, hampir dipastikan tidak ada makanan yang layak dimakan. Makanan masyarakat waktu itu adalah pondoh kelapa, pohon pepaya, ares (bonggol pisang yang ditumbuk dan dibuat seperti *tiwul* manis), pucuk lamtoro beserta buah mudanya (dibuat sayur), gadung dan umbi hutan atau istilahnya *iles-iles* (mulai tahu kalau *iles-iles* bisa dimakan yaitu di zaman Jepang), serta rumput-rumput laut (*suket segoro*) seperti *injen-injen*,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Abdurrahim, seorang juru ketik Kecamatan Wates Blitar Selatan menjelang Operasi Trisula sekaligus sebagai aktifis Ansor cabang Blitar waktu itu, pada hari Jum'at, 13-12-2002, pukul 16.00 – maghrib, di rumah Informan.; Informasi tersebut didukung pula oleh William H. Sebrell Jr., dkk (tim Editor Pustaka Time Life), *op. cit.*, hlm. 75.



*liminti* (tumbuhan laut yang tumbuh di karang-karang). Sampai ada yang mencari makanan di daerah Srengat - Blitar Utara dan juga daerah Rejotangan - Kabupaten Tulungagung, yaitu dengan cara menukarkan ternaknya dengan gablek, dengan perhitungan waktu itu: satu *pikul*<sup>50</sup> gablek sama dengan satu ekor lembu kurus.<sup>51</sup> Suasana semakin terpuruk ketika waktu itu belum ada dokter atau tim kesehatan, sehingga bagaimanapun juga cara menghindarinya adalah pengadaan makanan (apapun), dan bagi masyarakat yang sudah terjangkit penyakit HO khususnya akan mengalami kematian. Bagi yang meninggal karena penyakit tersebut dikumpulkan di desa Bendosari daerah Bakung.<sup>52</sup>

Dampak dari musibah hama tikus tersebut ternyata cukup luas yaitu tidak hanya menimbulkan penyakit HO saja namun lebih dari itu. Karena data-data tertulis sebelum Operasi Trisula tidak dapat diperoleh sehubungan dengan tidak adanya serah terima jabatan Pamong lama ke yang baru maka data-data lisanlah yang dianggap paling memenuhi syarat. Data-data penyakit-penyakit masyarakat yang mengiringi berkembangnya HO di Blitar Selatan terinci ke dalam tiga daerah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> *Pikul* merupakan satuan berat waktu itu sebelum masyarakat Blitar Selatan menggunakan satuan berat (kilogram). Menurut beberapa sumber diperkirakan beratnya sekitar 60 kg hingga 100 kg, tergantung kekuatan orang yang mengangkatnya dan juga tergantung pada barang apa yang dipikul. Jadi untuk ukuran pikul tidak memiliki kepastian ukuran.

<sup>51</sup> Mulyono, wawancara.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Pak Baris (mantan Kepala Desa Lorejo Wilayah Bakung) tahun 1960-an) dan Pak Supei di Desa Lorejo Kec. Bakung, pada hari Minggu, tanggal 02-02-2003, pukul 12.00 - 13.30 WIB, di rumah informan.

Daerah Bakung sebelum Operasi Trisula jenis penyakit yang ada yaitu antara lain Cacar (Veriola), Diarrhae, Arteristis, Malaria, Schabies (*gudig* : Jawa). Baru ketika operasi Trisula berlansung, Bakung memiliki klinik kesehatan yang terletak di desa Suruhwadang, padahal sebelumnya di tahun 1963/64 fasilitas medis yang tersedia hanya berupa barak untuk menampung pasien-pasien korban “*larang pangan*” dan disediakan pula makanan-makanan yang cukup layak. Barak ini awalnya didirikan di desa Suruhwadang yang disediakan untuk menampung pasien-pasien masyarakat Blitar Selatan bagian Barat yang kebanyakan didominasi masyarakat Bakung.<sup>53</sup>

Di daerah Wonotirto terdapat juga beberapa jenis penyakit sebagaimana daerah Bakung yaitu malaria, cacar air, gudik, beri-beri, kencing nanah, sakit mata (*belek* : Jawa), cacar, diarrhae. Dari semua jenis penyakit tersebut terdapat pada waktu sebelum dan sesudah Operasi Trisula. Jenis penyakit yang paling banyak merajalela di daerah ini sebelum Operasi Trisula adalah Malaria. Dari hasil penyelidikan Dinas Kesehatan tahun 1958, di desa Sumberboto terdapat 41 % penduduk menderita malaria, dan di desa Gunung Gede 65 %.<sup>54</sup>

Dari kelima desa di daerah ini, terdapat dua desa yang telah memiliki Balai Pengobatan dengan seorang mantri, yaitu desa Ngeni dan Wonotirto. Dalam menanggulangi penyakit cacar dan penyakit malaria di daerah ini telah diadakan

---

<sup>53</sup> Mulyono, wawancara.; Dan juga didukung oleh Habib Mustopo, dkk. (Tim Penelitian Khusus IKIP Malang), *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>54</sup> Habib Mustopo dkk, *ibid.*, hlm. 183

pencacaran massal kepada penduduk dan anak-anak, yang telah dimulai oleh Dinas Kesehatan Pemerintah sejak sebelum Operasi Trisula. Tentang pemberantasan Malaria dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Tentang Pemberantasan Malaria sebelum Operasi Trisula**

NAMA DESA	TANGGAL	CARAPENGOBATAN	JENIS OBAT
1. Kaligrenjeng 2. Gununggede 3. Sumberboto 4. Ngeni	Mulai tanggal 5 s/d 9 Januari 1966	Kunjungan Rumah ke Rumah	Comoquine (USA) 150 mgr.per-tablet
1. Kaligrenjeng 2. Wonotirto 3. Serang 4. Kaligambir	Mulai tanggal 21 s/d 26 Februari 1966	Dikumpulkan pada rumah-rumah pamong desa setempat	Comoquine (USA) 150 mgr.per-tablet

Sumber: Habib Mustopo (1969: hlm. 186)

Sedangkan untuk daerah Wates menurut catatan dari Dinas Kesehatan Daerah ini bahwa jenis penyakit yang sampai sesudah Operasi Trisula masih merajalela yaitu antara lain: busung lapar (Belanda: *Honger Oedeem*), desentri, malaria, penyakit pernafasan, borok (*abses*), cacar, *schabies* (*gudig*: Jawa), kencing nanah (*gonorrhoe*), kuning, kusta. Dari catatan Dinas Kesehatan, antara bulan Januari hingga September 1969 penyakit terbesar yang merajalela yaitu<sup>55</sup> :

1. Borok abses 116 penderita
2. Pernafasan 70 penderita
3. Malaria 52 penderita

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

## 2. Memakan Daging Tikus: Sebuah Solusi

Kondisi alam yang kurang bersahabat terhadap masyarakat sekitar Blitar Selatan, dan di daerah ini juga sulit sekali kita dapatkan makanan pokok seperti padi. Bahkan lebih parah lagi ketika wilayah ini berada dalam pendudukan Jepang, di samping sumber pangan yang minim, makanan-makanan pokok penduduk beserta seluruh hasil kekayaan alam yang berharga bagi Jepang, terutama beras, wajib disetorkan pada pihak Jepang. Akhirnya sama sekali masyarakat kehilangan bahan pangan sehari-hari dan makanan bergizi hingga muncullah bahaya kelaparan dan busung lapar/HO. Pada saat itulah, bekicot pertama kali muncul untuk menyembuhkan (mesti tidak banyak) penyakit masyarakat tersebut di daerah Blitar secara umum sehingga pada saat pendudukan Jepang, masyarakat mulai mencoba mengonsumsi hewan ini sebagai makanan pengganti. Bahkan bekicot hingga kini banyak dikonsumsi masyarakat daerah Blitar dan Kediri sebagai lauk pauk atau camilan/*snack* yang terkenal dengan nama “nol dua” dan ada tengara daging bekicot memiliki nilai gizi cukup tinggi.<sup>56</sup>

Namun, lain ceritanya Blitar Selatan di tahun 1962 hingga 1964, jika di masa pendudukan Jepang makanan penggantinya adalah bekicot, sedangkan di awal 1960-an sebagai makanan pengganti adalah tikus. Blitar terserang penyakit HO yang kedua kalinya, meski pada tahun ini hanya sebatas Blitar bagian selatan sehingga tidak ada jalan lagi bagi masyarakat atau penduduk untuk menghindari

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sami'ah (77), Desa Kauman - Kec. Srengat - Kab. Blitar, 14 April 2002, di rumah Informan.

dari penyakit HO ini, yaitu dengan cara memakan daging tikus. Sebab yang ada waktu itu adalah tikus yang merimpah ruah. Gerakan ini dimassalkan oleh pemerintahan desa waktu itu, yaitu dengan cara setiap penduduk wajib melaporkan hasil buruan tikusnya berupa buntutnya atau ekornya saja kepada pemerintahan kecamatan di Suruhwadang.<sup>57</sup> Namun ternyata resolusi memakan daging tikus tersebut bukanlah satu-satunya penyelesaian masalah, tetapi masih banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi krisis tersebut antara lain<sup>58</sup>:

- a) Meminjam ternak kepada yang masih punya, kemudian dijual, dan dibeli tanaman pangan (seperti gapek, gamblong (ampas ketela), dan ubi rambat) untuk ditanam. Lalu tanaman pangan tersebut dapat dipinjam-pinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan dikembalikan sesudah panen, atau tanpa dikembalikan.
- b) Minta sumbangan ke daerah-daerah surplus (Blitar Utara), hasilnya diberikan kepada orang yang membutuhkan.
- c) Memanggilkan aparat atau mantri kesehatan di Suruhwadang.
- d) Mengadakan gerakan pembasmian tikus secara massal, dagingnya dimakan, ekornya disetorkan ke panitia, di setiap desa. Dari desa ke kecamatan lalu ke kabupaten.

---

<sup>57</sup> Mukadji, Wawancara.

<sup>58</sup> Mulyono, wawancara.

- e) Pemerintah daerah tingkat II beserta instansi terkait, menyelenggarakan penampungan (barak) bagi penderita penyakit HO yang bertempat di desa Bendosari kecamatan Suruhwadang. Sebagai tempat perawatan, pengobatan, dan memberikan makanan-makanan yang bergizi (seperti susu, kacang hijau, makan nasi dengan lauk pauknya, dan juga pakaian-pakaian bekas). Itu semua melibatkan aparat setempat dan masyarakat.

Ternyata hasilnya cukup baik dan dapat dikatakan 90 % berhasil. Sedangkan yang tidak tertampung, ternyata daging tikus bisa menyembuhkan HO. Hanya karena terbatasnya aparat kesehatan, sehingga ada sebagian yang sempat meninggal, tetapi tipis sekali kurang lebih 5 %. Yang paling banyak dari warga terserang HO adalah warga Bakung, yang dulu masuk kecamatan Wonotirto sampai ke selatan. Sedangkan di wilayah utara kondisinya lebih baik karena secara profesi mereka sudah mulai beragam, artinya penduduk tidak hanya berprofesi sebagai petani. Sedangkan warga masyarakat yang tidak sempat ditampung sebagian besar bersikap pasrah. Jadi tidak dapat ditampung semua, hal ini lebih disebabkan jaraknya yang sangat jauh terutama masyarakat yang berada paling selatan dan jalanan masih setapak semua, tidak ada transportasi dan informasipun (tentang bantuan medis) tidak terjangkau sampai ke pelosok sehingga tidak ada jalan bagi mereka yang tidak tertampung selain pasrah. Dengan demikian, penyakit HO oleh pak Mulyono waktu itu dapat dikatakan me-

wabah<sup>59</sup>, artinya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan makanan, bukan karena penularan melalui perantara virus atau bakteri. Akhirnya berlalulah masa krisis tersebut pada awal tahun 1964.<sup>60</sup>

Hingga pada tahun 64, krisis pangan berangsur-angsur membaik. Hal ini juga tidak lepas dari keterlibatan PKI di daerah ini. PKI waktu itu bersikap sangat baik terhadap masyarakat karena waktu itu ada *issue* mendekati Pemilu, meskipun akhirnya diundur. Kebaikan PKI terhadap masyarakat Blitar Selatan antara lain membantu kekurangan masyarakat di segala bidang, terutama masalah pangan dan pertanian, juga membentuk “Kerja Saling Bantu” yaitu sambil propaganda partai PKI, juga membantu masyarakat tani kerja di ladang. Maka terjadilah suasana belajar sambil bekerja di ladang masing-masing, hingga sampailah isu-isu dan pawai-pawai penggayangan Malaysia dan tujuh setan desa dengan penerapan UUPA dan UUPBH merupakan pemandangan yang biasa di Blitar Selatan waktu

---

<sup>59</sup> Lihat *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 15., (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 18. Batasan wabah dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia ini adalah penyebaran (dalam media apapun) suatu penyakit secara cepat di suatu wilayah. Dalam bidang *epidemiologi* (ilmu penyebaran penyakit), wabah disebut *epidemi* bila wilayah penyebarannya tidak luas (berdasarkan keputusan WHO, minimal penyakit tersebut menyerang 15 % penduduk di wilayah tertentu), dan *pandemi* bila wilayah penyebarannya hampir seluruh penjuru dunia.; Sedangkan berdasarkan UU No.6 tahun 1962 tentang Wabah bab II pasal 2, berbunyi: “Dengan wabah dalam Undang-undang ini dimaksudkan: penularan sesuatu penyakit dengan cepat di suatu daerah tertentu, sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita menjadi banyak, yang harus dibatasi dengan isolasi si penderita dari orang-orang lain di sekitarnya.” dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia* No.12 Tahun 1962. Lihat lampiran 4 dalam riset ini.; Dengan demikian HO tidak dapat dikatakan wabah sebagaimana dijelaskan dalam lembaran negara di atas, karena penyakit ini tidak menular atau tidak menyebar dalam arti memiliki media perantara berupa virus, melainkan media perantaranya atau penyebabnya adalah karena bahan pangan penduduk yang langka dan tidak seimbang. Di samping itu berdasarkan standar Internasional mengenai wabah, HO di Blitar Selatan pada musim kering yang panjang dan merajalelanya hama tikus (1962-1963) belum terbukti secara tertulis (sumber primer) menyerang lebih dari 15 % penduduknya.

<sup>60</sup> Mulyono, wawancara.

itu. Dan puncaknya yaitu munculnya Gestok sehingga dapat dipastikan bahwa waktu itu di mana ada kelaparan dan kemiskinan, pasti PKI dapat bergerak secara leluasa di sana.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Terlepas dari ada tidaknya kepentingan politik di dalamnya, konsep ekonomi Marx masih konsekuen diterapkan oleh PKI. Adapun inti konsep ekonomi tersebut, yakni: tanpa logistik, pikiran tidak akan logis. Konsep tersebut terlihat implementasinya di Blitar Selatan, ketika PKI menerapkan sistem “kerja saling bantu”, di mana mampu memberikan kesan bahwa seiring dengan upaya memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat kecil, seketika itu juga kebutuhan “otak” diperhatikan. Oleh sebab itu keberpihakan kaum komunis selalu pada orang yang tertindas dan tak mempunyai, sebagaimana seruan Marx dalam teori Krisis dan Keruntuhannya, yaitu: “Kaum Proletar Sekalian Negara, Bersatulah!”. Lihat bab satu, hlm. 18-19 dalam riset ini.



## **BAB IV**

# **STRATEGI POLITIK PKI DI BLITAR SELATAN**